

RESIKO DALAM PERJANJIAN KREDIT BANK DALAM KAITANNYA DENGAN PERLINDUNGAN KONSUMEN

Oleh : Rohyani R. I. Sumilat¹

ABSTRAK

Dalam setiap produk bank selalu terdapat ketentuan-ketentuan yang ditawarkan oleh bank. Dengan adanya persetujuan dari nasabah terhadap formulir perjanjian yang dibuat oleh bank, berarti nasabah telah menyetujui isi serta maksud perjanjian dan dengan demikian berlaku *facta sumservanda* yaitu perjanjian tersebut mengikat kedua belah pihak. Tujuan yang ingin dicapai dari penulisan ini adalah Untuk dapat mengetahui dan memahami resiko apa saja yang timbul dalam perjanjian kredit bank, mengetahui dan memahami upaya-upaya apa saja yang dapat dilakukan untuk memberikan perlindungan terhadap nasabah debitur terhadap resiko yang timbul dalam perjanjian kredit bank.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif, karena yang akan diteliti mengenai resiko hukum yang terjadi di dalam perjanjian kredit bank dalam kaitannya dengan perlindungan konsumen. Penulis melakukan penelitian hukum normatif yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat di dalam peraturan perundang-undangan, penelitian ini disebut juga dengan penelitian doktrinal yaitu penelitian yang menganalisis berdasarkan hukum yang tertulis dalam buku dimana penelitian tersebut menggunakan data-data yang diperoleh dari bahan-bahan hukum primer dan sekunder.

Kredit sebagai salah satu sumber pendanaan yang penting bagi masyarakat, mempunyai resiko dalam pelaksanaannya. Resiko tersebut akan ditanggung baik oleh bank maupun oleh debitur. Perjanjian kredit bank dibuat dalam bentuk baku oleh bank dimana didalamnya terdapat klausul-klausul baku. Karena itu bank dapat dikatakan mempunyai kedudukan yang lebih kuat jika dibandingkan dengan nasabah debitur. Ketidaksetaraan kedudukan dalam perjanjian kredit bank ini menimbulkan resiko bagi pihak nasabah debitur, terutama isi perjanjian bank yang memuat klausul eksonerasi yang membebaskan bank sebagai kreditur dari kewajibannya. Hal ini tentulah merugikan nasabah debitur sebagai konsumen dari jasa yang diberikan bank.

Untuk menjamin keseimbangan kedudukan di dalam perjanjian kredit bank yang berbentuk perjanjian baku antara bank sebagai kreditur dengan nasabah debitur diperlukan adanya pengawasan atau campur tangan dari pemerintah misalnya dengan memberikan rekomendasi atau izin atas suatu

¹ Lulusan Pada Program Studi Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Sam Ratulangi Manado Tahun 2013

bentuk formula perjanjian kredit yang dibuat oleh bank. Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 telah mengatur pencantuman klausul baku dalam perjanjian yang dibuat oleh pelaku usaha termasuk bank, yaitu pada Pasal 18 Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK). Pengaturan mengenai klausul baku ini dapat dijadikan sebagai landasan sebagai perlindungan nasabah debitur dalam perjanjian kredit bank selain dari peraturan-peraturan lainnya misalnya dengan Peraturan Bank Indonesia.

A. PENDAHULUAN

Perbankan merupakan salah satu sumber dana diantaranya dalam bentuk perkreditan bagi masyarakat, perorangan, atau badan usaha untuk memenuhi kebutuhan konsumsinya atau untuk meningkatkan produksinya. Kebutuhan yang menyangkut kebutuhan positif misalnya untuk meningkatkan dan memperluas kegiatan usahanya. Setiap orang atau badan usaha yang berusaha meningkatkan kebutuhan konsumtif dan produktif sangat memerlukan pendanaan baik dari salah satunya dalam bentuk kredit mengingat modal yang dimiliki perusahaan atau perorangan biasanya tidak mampu mencukupi dalam mendukung peningkatan usahanya.

Dilihat dari bentuknya, perjanjian kredit perbankan pada umumnya menggunakan bentuk perjanjian baku (*standard contract*). Berkaitan dengan itu, memang dalam praktiknya bentuk perjanjiannya sudah disediakan oleh pihak bank sebagai kreditor sedangkan debitur hanya mempelajari dan memahaminya dengan baik. Perjanjian yang demikian itu biasa disebut dengan perjanjian baku (*standar contract*), dimana dalam perjanjian tersebut pihak debitur hanya dalam posisi menerima atau menolak tanpa ada kemungkinan untuk melakukan negosiasi atau tawar-menawar yang pada akhirnya melahirkan suatu perjanjian yang “tidak terlalu menguntungkan” bagi salah satu pihak.

Undang-undang No. 8 Tahun 1998 tentang Perlindungan Konsumen Bab V pada Pasal 18 diatur mengenai klausula baku yang melarang pembuatan atau pencantuman klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian dengan beberapa keadaan tertentu. Pengaturan melalui Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang sangat terkait dengan perlindungan hukum bagi nasabah selaku konsumen perbankan adalah ketentuan mengenai tata cara pencantuman klausula baku.

B. PERUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang di atas, permasalahan yang akan dibahas penulis dalam penulisan tesis ini adalah:

1. Bagaimana resiko yang dapat timbul dalam perjanjian kredit bank?

2. Bagaimana upaya-upaya perlindungan bagi nasabah dari resiko yang timbul dalam perjanjian kredit bank?

C. METODE PENELITIAN

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif, karena yang diteliti mengenai resiko hukum yang terjadi di dalam perjanjian kredit bank dalam kaitannya dengan perlindungan konsumen ini penulis melakukan penelitian hukum normatif yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat di dalam peraturan perundang-undangan, penelitian ini disebut juga dengan penelitian doktrinal (*doctrinal research*), yaitu penelitian yang menganalisis berdasarkan hukum yang tertulis dalam buku (*law as it written in the book*), dimana penelitian tersebut menggunakan data-data yang diperoleh dari bahan-bahan hukum primer dan sekunder.

Penelitian ini bersifat Deskriptif-analitis, karena prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan/melukiskan keadaan subyek/obyek penelitian, dalam hal ini manajemen risiko yaitu keadaan yang dapat dialami oleh pihak nasabah (debitur) maupun pihak bank (kreditur) terkait dengan pertimbangan-pertimbangan bank dalam penyaluran kredit bagi nasabah sebagai konsumen serta fakta-fakta yang ada dalam penerapan peraturan perundang-undangan yang tampak atau sebagaimana adanya.

Jenis data dapat dikelompokkan menjadi data kualitatif dan data kuantitatif. Dalam penelitian ini lebih banyak digunakan data kualitatif sebab penelitian akan dilakukan secara deskriptif. Data kualitatif ini dinyatakan dalam bentuk kalimat atau uraian Penelitian hukum normatif maka yang digunakan sebagai sumber data adalah bahan pustaka. Apabila dilihat dari sudut sifat informasi yang diberikannya bahan pustaka dapat dibagi dalam 2 kelompok sebagai berikut:

1. Bahan hukum primer, yakni bahan pustaka yang berisikan pengetahuan ilmiah yang baru atau mutakhir, ataupun pengertian baru tentang fakta yang diketahui maupun mengenai suatu gagasan (*ide*).
2. Bahan/sumber primer ini mencakup : buku, kertas kerja lokakarya/seminar dan lain-lain, laporan penelitian, majalah, disertasi/tesis.

Mengingat penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, maka data yang diidentifikasi diperoleh dengan menggunakan teknik/studi kepustakaan. Dalam teknik/studi kepustakaan penelitian ini tidak pernah dapat dilepaskan dari literatur-literatur ilmiah. Dalam penelitian kualitatif, teknik ini berfungsi sebagai alat pengumpul data utama, karena pembuktian hipotesanya dilakukan secara logis dan rasional melalui pendapat, teori atau hukum-hukum yang diterima kebenarannya, baik yang menolak maupun yang mendukung hipotesa tersebut.

Teknik analisis data yang dipergunakan adalah metode analisis kualitatif yang artinya kegiatan mengumpulkan data kemudian diadakan pengeditan terlebih dahulu untuk selanjutnya dimanfaatkan sebagai bahan analisis yang sifatnya kualitatif yang dalam penelitian ini juga digunakan pendekatan yuridis normatif, kemudian untuk menganalisis data yang dilakukan dengan analisis normatif kualitatif, dan diharapkan dapat menghasilkan data deskriptif kualitatif.

D. PEMBAHASAN

Kata 'resiko' memiliki banyak arti dan konotasi. Kata tersebut banyak digunakan oleh pelaku dagang professional, manager resiko, dan publik. Sejumlah besar nama muncul untuk menjelaskan berbagai jenis resiko: resiko bisnis, resiko keuangan, resiko pasar, resiko likuiditas, resiko sistematis, resiko spesifik, resiko residual, resiko kredit, resiko *counterparty*, resiko operasi, resiko penyesuaian, resiko negara, resiko *portofolio*, resiko sistemik, resiko legal, resiko reputasi, dll.

Debitur yang wanprestasi sehingga menimbulkan kerugian diancamkan sanksi wanprestasi yang dapat berupa pilihan resiko: tetapi apabila wanprestasinya debitur itu dapat dibuktikan disebabkan terjadinya keadaan memaksa pada salah satu pihak dari suatu perjanjian membuat pihak itu wanprestasi sehingga timbullah kerugian bagi pihak-pihak. Sedangkan pengertian resiko adalah kewajiban memikul kerugian disebabkan kejadian di luar kesalahan salah satu pihak. Apabila pengertian resiko itu dihubungkan dengan pengertian keadaan memaksa, dapat dikatakan bahwa resiko adalah kewajiban memikul kerugian disebabkan wanprestasinya salah satu pihak (dari suatu perjanjian) yang ditimpa keadaan memaksa. Jadi dengan singkat dapat dikatakan bahwa resiko itu sebenarnya adalah kewajiban memikul kerugian disebabkan terjadinya keadaan memaksa.

Persoalan resiko itu diharapkan dapat diselesaikan dengan peraturan atau ketentuan mengenai resiko yang memuat ketentuan tentang siapakah atau pihak manakah yang berkewajiban memikul kerugian jika terjadi kejadian di luar kesalahan pihak-pihak. Peraturan atau ketentuan resiko di dalam hukum positif terdapat dalam buku ketiga KUH Perdata.

Pengertian kredit di atas pada Undang-undang No. 10 Tahun 1998, sebagaimana tertuang dalam pasal 1 angka 11 mengalami sedikit perubahan, selengkapnya sebagai berikut :

Kredit penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak meminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga.

Kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang diberikan oleh bank mengandung resiko, sehingga dalam setiap pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah merupakan asas-asas perkreditan atau pembiayaan berdasarkan prinsip kehati-hatian. Untuk itu, sebelum memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, bank harus melakukan penilaian yang seksama terhadap berbagai aspek. Berdasarkan penjelasan Pasal 8 Undang-undang Perbankan yang mesti dinilai oleh bank sebelum memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah watak, kemampuan modal, agunan, dan prospek usaha dari nasabah debitur, yang kemudian dikenal dengan sebutan “the five C of credit analysis” atau prinsip 5 C’s.

Anggungan merupakan jaminan tambahan yang diperlukan dalam hal pemberian fasilitas kredit, hal tersebut sesuai dengan pengertian anggungan yang termuat dalam Pasal 1 angka 23 Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan, yaitu bahwa anggungan adalah jaminan tambahan yang diserahkan nasabah debitur kepada bank dalam rangka pemberian fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah. Dengan kedudukannya sebagai jaminan tambahan maka bentuk anggungan menurut penjelasan Pasal 8 Undang-undang No.10 Tahun 1998 tentang perbankan.

Perjanjian kredit merupakan perjanjian baku (*standart contract*) dimana isi atau klausul-klausul perjanjian kredit tersebut telah dibakukan dan dituangkan dalam bentuk formulir (blangko). tetapi tidak terikat dalam suatu bentuk tertentu (*vorn vrij*). Calon nasabah debitur tinggal membubuhkan tandatangannya saja apabila bersedia menerima isi perjanjian tersebut, tidak memberikan kesempatan kepada calon debitur untuk meimbicarakan lebih lanjut isi atau klausul-klausul yang diajukan pihak bank. Perjanjian baku diperlukan untuk memenuhi kebutuhan yang sifatnya praktis dan kolektif.

Terhadap perjanjian kredit terdapat beberapa pandangan, yaitu : Subekti mengatakan bahwa dalam bentuk apapun juga pemberian itu diadakan dalam semuanya itu pada bakikatnya yang terjadi adalah suatu perjanjian pinjam-meminjam sebagaimana diatur oleh KUH Perdata pasal 1745- 1769. Mirip dengan pendapat Subekti adalah pendapat Marhais Abdul Hay yang mengatakan bahwa perjanjian kredit adalah identik dengan perjanjian pinjam-meminjam dan dikuasai oleh ketentuan Bab XIII Buku III KUTH Perdata.

1. Resiko Perjanjian Kredit Bank

Resiko terhadap bank itu sendiri dapat berupa: *Credit Risk*, yang sangat mendasar dari semua *product market risk* suatu bank karena risiko ini merupakan erosi nilai (*erosion of value*) yang disebabkan oleh terjadinya wanprestasi atau nonpayment dari debitur. Jadi debitur tidak mau atau tidak

mampu memenuhi kewajiban membayar bunga dan utang pokok atau angsuran utang pokok kreditnya atau "tidak prospek mampu untuk membayar" (tidak memperlihatkan tanda-tanda mampu membayar karena gagal usaha).

Strategic (Bussines) Risk yaitu risiko yang meliputi seluruh bidang usaha, berupa kemungkiimn kalah bersaing atan sudah ketinggalan dalam bersaing. Dapat pula terjadi bahwa sebuah bank tidak siap atau tidak sanggup bersaing atas *line of business* yang baru, seperti halnya *credit card* dimana bank tersebut terhambat memasuki bidang ini.

Regulatory Risk yaitu risiko yang berkait dengan berbagai peraturan atau perundang-undangan yang menjadi rambu-rambu kegiatan perbankan. *Operating Risk*, yaitu risiko yang banyak kaitannya dengan sistem dan prosedur, yang kurang layak atau tepat dan mungkin menyebabkan kerugian atau menurunkan nilai services yang diberikan kepada nasabah. *Commodity Risk*, yaitu risiko yang berkaitan dengan harga-harga *commodity*. Harga komoditas mempunyai pengaruh besar terhadap kegiatan perbankan dan kegiatan lembaga keuangan lainnya, yang sulit dideteksi dan diketahui lebih dahulu (*unpredictable*). *Human Resources Risk*, yaitu risiko yang berkaitan dengan faktor kelemahan atau kesalahan yang ditimbulkan tindakan manusia. Risiko ini sukar diukur karena risiko atas nilai-nilai kemanusiaan tidak bersifat nyata. Risiko ini dapat diatasi dengan *recruitment* terpilih, pelatihan professional, penanaman motivasi dan pembinaan daya tahan. *Legal Risk*, yaitu risiko yang timbul dari *legal system* yang dapat menghapuskan atau mengurangi nilai para pemegang saham bank karena adanya tuntutan hukum kepada bank oleh debitur.

Perjanjian kredit bank banyak mengandung klausul-klausul yang memberatkan nasabah debitur, yakni yang memuat klausul-klausul yang tidak wajar dan tidak adil dengan menyalahgunakan keadaan nasabah debitur. Hal demikian ini terjadi karena secara ekonomis dan psikologis kedudukan bank sangat kuat dan tidak seimbang dengan nasabah debitur pada saat penandatanganan pemberian kredit. Kuatnya posisi tawar bank mengakibatkan terjadinya ketidakseimbangan kedudukan antara bank dengan debitur, sehingga terkesan bank memanfaatkan keadaan tersebut untuk memaksakan kehendaknya. Hal ini dapat terlihat dari isi perjanjian kredit tersebut yang dibuat oleh bank secara sepihak.

2. Upaya-upaya Perlindungan Bagi Nasabah Terhadap Risiko Yang Timbul Dalam Perjanjian Kredit Bank

Bank Indonesia sebagai otoritas pengawas industri perbankan berkepentingan untuk meningkatkan perlindungan terhadap kepentingan nasabah dalam berhubungan dengan bank. Mengingat pentingnya permasalahan tersebut, Bank Indonesia telah menetapkan upaya perlindungan nasabah sebagai salah satu pilar dalam Arsitektur Perbankan Indonesia (API)

yang diluncurkan oleh Gubernur Bank Indonesia pada tanggal 9 Januari 2004.

API sendiri merupakan suatu cetak biru sistem perbankan nasional yang terdiri dari enam pilar untuk mewujudkan misi sistem perbankan yang sehat, kuat dan efisien guna menciptakan kestabilan sistem keuangan dalam rangka membantu mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. PBI No. 717/PBI/2005 tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah, Bank Indonesia mewajibkan seluruh bank untuk menyelesaikan setiap pengaduan nasabah yang terkait dengan adanya potensi kerugian finansial pada sisi nasabah. Dalam PBI ini diatur mengenai rata cara penerimaan, penanganan. dan juga pemantauan penyelesaian pengaduan. Selain itu, bank diwajibkan pula untuk memberikan laporan triwulanan kepada Bank Indonesia mengenai pelaksanaan penyelesaian pengaduan nasabah tersebut.

Prinsipnya, PBI di atas mengatur bahwa bank tidak diperkenankan menolak setiap pengaduan yang diajukan secara lisan matipun tertulis. Untuk pengaduan lisan, bank wajib menyelesaikannya dalam waktu 2 hari kerja sedangkan untuk pengaduan tertulis wajib diselesaikan dalam waktu 20 hari kerja dan dapat diperpanjang hingga 20 hari kerja berikutnya apabila terdapat kondisi-kondisi tertentu.

E. PENUTUP

Risiko yang terdapat dalam perjanjian kredit bank dapat dilihat dari dua sisi yaitu risiko yang ditanggung oleh bank sebagai kreditur dan risiko yang ditanggung oleh nasabah debitur. Risiko yang ditanggung bank sebagai kreditur dapat berupa *Credit Risk Strategic Risk, Regulatory Risk Operating Risk, Commodity Risk, Human Resources Risk*, dan *Legal Risk*. Sedangkan risiko yang ditanggung oleh nasabah debitur antara lain risiko yang ditanggung debitur karena bentuk dari perjanjian kredit bank yang baku (standar) sehingga debitur tidak dapat ikut menentukan isi perjanjian tersebut. Kedudukan yang berbeda antara bank dan nasabah debitur yakni dimana bank memiliki posisi tawar yang lebih kuat jika dibandingkan dengan nasabah debitur menyebabkan ketidakseimbangan dalam pembuatan perjanjian kredit bank.

Hal ini disebabkan perjanjian kredit bank tersebut dibuat dalam bentuk yang baku (standar) oleh pihak bank sehingga isi dari perjanjian kredit baku tersebut lebih menguntungkan pihak bank sedangkan nasabah hanya dapat menerimanya. Bank dapat memasukkan klausul-klausul yang menguntungkannya namun merugikan pihak nasabah debitur seperti klausul eksonerasi yang membebaskan bank sebagai kreditur dari kewajibannya. Upaya perlindungan bagi nasabah debitur terhadap risiko yang dialaminya dalam perjanjian kredit bank selain dapat dilakukan dengan penerapan pasal 18 UUPK juga dapat dilakukan sesuai dengan kebijakan Bank Indonesia. Bank Indonesia sejak awal tahun 2002 mulai menyusun cetak biru sistem

perbankan nasional yang salah satu aspek di dalamnya tercakup upaya untuk melindungi dan memberdayakan nasabah.

Upaya ini kemudian berlanjut dan dituangkan menjadi Pilar ke VI dalam API yang mencakup empat aspek, yaitu mekanisme pengaduan nasabah, pembentukan lembaga mediasi independen, transparansi informasi produk dan edukasi nasabah. Keberadaan lembaga mediasi perbankan merupakan sebuah bentuk perlindungan terhadap konsumen. Hal ini merupakan salah satu langkah kebijakan yang akan diterapkan Bank Indonesia (BI) yang tertuang dalam Arsitektur Perbankan Indonesia (API). Oleh karena itu, kepercayaan dari masyarakat harus tetap terjaga. Keberadaan Lembaga Mediasi independen ini akan memberikan manfaat baik bagi nasabah maupun bank.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Djumhana, Mohammad, 2000. *Hukum Perbankan di Indonesia*. Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Fuady, Munir, 1996. *Hukum Perkreditan Kontemporer*. Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Hasan, Djuhaendah, 1996. *Lembaga Jaminan Kebendaan Bagi Tanah dan Benda Lain yang Melekat pada Tanah Dalam Konsepsi Penerapan Asas Pemisahan Horisontal*. Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Hasibuan, Malayu, 2006, *Dasar-Dasar Perbankan*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Herman Darmawi, 2000, *Manajemen Risiko*, Bumi Akasara, Jakarta.
- Husein Umar, 2001, *Manajemen Risiko Bisni, Pendekatan Finansial dan Nonfinancial*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Miru, Ahmadi, 2004. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Projodikoro, Wiryono, 1981. *Asas-asas Hukum Perdata*. Bandung: Sumur.
- Saleh Ma'ruf, Mohammad, 1999 "Langkah Antisipasi yang Harus Dilakukan Perbankan dalam Menyelesaikan Kredit Bermasalah, Solusi Hukum dalam Menyelesaikan Kredit Bermasalah", InfoBank, Vol. 243. hal 16.
- Shidarta, 2006. *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Jakarta : Grasindo.
- Siamat, Dahlan, 1993. *Manajemen Bank Umum*. Jakarta : Intermedia.
- Sjahdeni Sutan Remy, 1993. *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*. Jakarta : Institut Bankir Indonesia.
- Soekisno Djojosoedarso, 1999, *Prinsip-Prinsip Manajemen Risiko dan Asuransi*, Penerbit Salemba Empat, Jakarta.

- Soeryono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, Cet IV, 2001.
- Suad Husnan dan Enny Pudjiastuti, 2000; *Dasar-Dasar Manajemen Keuangan*, edisi kedua, Penerbit UPP AMP YKPN, Yogyakarta.
- Subekti, 1976. *Hukum Perjanjian*, Jakarta : Intermasa.
-, 1982. *Jaminan-jaminan Untuk Pemberian Kredit menurut Hukum Indonesia*, Bandung : Alumni.
- Sudarsono, 2007. *Kamus Hukum*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Syamsu Iskandar, 2008, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*. PT Semestas Asa Bersama, Jakarta.
- Thomas Suyatno dalam Wulanmas Frederik. *Hukum Perbankan*. PT. Genta Press, Yogyakarta, 2012..
- Usman, Rachmadi, 2003. *Aspek-aspek Hukum Perbankan di Indonesia*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama

Peraturan Perundang-undangan :

- Undang-undang No. 7 Tahun 1992 sebagaimana diubah dengan Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.
- Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- Undang-Udang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase.
- Peraturan Bank Indonesia No. 7/7SPBI/2005 tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah.
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/25/PBI/2009 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum.